

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

Marinus Ronal¹, Albert Agus Massua²

^{1,2} Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia.

Abstract. *Regional Financial Performance Analysis is a form of accountability and a manifestation of financial decentralization and authority from the center to the regions. Regions that are able to manage their finances effectively and efficiently are certainly expected to be able to stimulate the economy through budget absorption in productive sectors and their potential so that they will be able to overall increase efficiency, effectiveness and independence. In this study, the ratio analysis of independence, efficiency and effectiveness is used to see how far the Tana Toraja Regency Government is in managing its regional finances. The results of the ratio calculations carried out resulted in an average independence rate of 22% during the research year (2017-2019). While the results of the calculation of the regional financial efficiency ratio are an average of 88% and the results of the calculation of the effectiveness ratio of regional original income reach an average of 71%.*

Keywords: *Regional Original Income, Independence, Effectiveness, efficiency*

Abstrak. Analisis Kinerja Keuangan Daerah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban dan wujud dari desentralisasi keuangan maupun kewenangan dari pusat ke daerah. Daerah yang mampu mengelola keuangannya secara efektif dan efisien tentu diharapkan mampu merangsang perekonomian melalui penyerapan anggaran di sektor-sektor produktif dan potensial yang dimiliki sehingga secara menyeluruh akan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kemandirian. Dalam penelitian ini digunakan analisis rasio kemandirian, efisiensi dan efektivitas untuk melihat sejauh mana Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam mengelola keuangan daerahnya. Hasil perhitungan rasio yang dilakukan menghasilkan angka kemandirian rata-rata 22% selama tahun penelitian (2017-2019). Sedangkan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah rata-rata 88% dan untuk hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah mencapai angka rata-rata 71%.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian, Efektivitas, efisiensi.

PENDAHULUAN

Jika dilihat dari pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Tana Toraja didelegasikan memiliki tingkat ketergantungan moneter yang benar-benar tidak dapat disangkal pada Pemerintah Pusat. Terlebih lagi, dalam hal pengeluaran, sebagian besar rencana keuangan pemerintah daerah tidak sepenuhnya matang. Hal ini menunjukkan dua prospek, yang pertama adalah bahwa pemerintah daerah tidak dapat meningkatkan pelaksanaan rencana keuangan yang terkait dengan pemerintah dan pembangunan daerah, atau pemerintah daerah telah sukses dalam hal efisiensi pengeluaran untuk mengurangi konsumsi berbagai program perbaikan di kabupaten.

Pencapaian suatu pemerintahan pada Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) dapat kita lihat dari sumber perkiraan persentasi yang sudah dicapainya. Dalam hal ini, pengelolaan belanja memberikan petunjuk atau gambaran yang lebih mengenai kemampuan secara konsisten suatu daerah untuk mengkaji kemampuan daerah dalam membangun, potensi belanja dan pendapatan yang akan mempengaruhi kemampuan pembiayaan daerah. Tercantum dalam UU No 32 Tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan suatu komitmen dan hak dalam menetapkan pilihan untuk mengawal masalah pemerintahan dan kepentingan daerah dalam mengawasi aset di suatu ruang. Tugas pemerintah terdekat dalam mengawasi dana sangat menentukan pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Satuan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2017-2019. Adapun satuan pengamatan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun anggaran 2017-2019.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio. Analisis Rasio merupakan suatu metode perhitungan serta implementasi rasio keuangan guna menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang akan dianalisis menggunakan rasio-rasio dibawah ini :

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Dengan rumus:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10 %	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40 %	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2010)

Rasio Efektivitas PAD

Dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan (PAL)}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Baik
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 80%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan rumus:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAL)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100$$

Tabel Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian
Sangat Kurang	0 – 10
Kurang	10 – 20
Sedang	20 – 30
Cukup	30 – 40
Baik	40 – 50
Sangat Baik	>50

Sumber : Halim (2007)

HASIL

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian tingkat kemajuan pelaksanaan realisasi APBD tahun anggaran 2017-2019 dengan menggunakan tiga analisa yaitu rasio efisiensi, efektivitas dan kemandirian.

Dengan menggunakan data APBD dan laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2017-2019, maka dilakukan analisis dengan cara:

Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Analisis rasio efisiensi digunakan untuk melihat seberapa efisien suatu pemerintahan dalam mengelolah aset keuangannya.

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{REKD 2017} &= \frac{997.621.856.319,29}{1.095.027.645.917,93} \times 100\% \\ &= 0,911 \times 100 \\ &= 91,10 (91\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{REKD 2018} &= \frac{961.218.936.919,34}{1.071.079.856.692,94} \times 100\% \\ &= 0,897 \times 100 \\ &= 89,74 (90\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{REKD 2019} &= \frac{979.371.368.464,91}{1.190.812.429.313,08} \times 100\% \\ &= 0,822 \times 100 \\ &= 82,24 (82\%) \end{aligned}$$

Dengan melihat data pada perhitungan efisiensi, tahun 2017 rasio efisiensi sebesar 91% dan masuk kategori tidak efisien, tahun 2018 dan 2019 masuk kategori tidak efisien pula karena nilai efisiennya sebesar 90% dan 82%.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui seberapa kemampuan suatu pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan setiap periode. Adapun rasio efektivitas pemerintah kabupaten tana toraja selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

$$\text{REPAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan (PAL)}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{REPAD 2017} &= \frac{140.418.241.234,93}{150.563.647.813,00} \times 100\% \\ &= 0,93 \times 100 \\ &= 93,26 (93\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{REPAD 2018} &= \frac{106.108.442.618,94}{184.700.000.000,00} \times 100\% \\ &= 0,57 \times 100 \\ &= 57,44 (57\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{REPAD 2019} &= \frac{119.464.168.341,55}{187.752.107.000,00} \times 100\% \\ &= 0,63 \times 100 \\ &= 63,62 (64\%) \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka rasio efektivitas PAD Kabupaten Tana Toraja tahun 2017 sebesar 93%. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja cukup efektif dalam mengelolah pendapatan asli daerahnya, sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018, tingkat efektivitas PAD Kabupaten Tana Toraja turun drastis ke angka 57% dan pada tahun 2019 tingkat efektivitas PAD Kabupaten Tana Toraja berada pada angka 64%.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu pemerintahan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat. Adapun rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Tana Toraja dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100$$

$$\begin{aligned}\text{RKKD 2017} &= \frac{150.563.647.813,00}{753.651.126.889,00} \times 100\% \\ &= 0,19 \times 100 \\ &= 19,97 (20\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{RKKD 2018} &= \frac{184.700.000.000,00}{705.129.367.000,00} \times 100\% \\ &= 0,26 \times 100 \\ &= 26,19 (26\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{RKKD 2019} &= \frac{187.752.107.000,00}{729.080.822.000,00} \times 100\% \\ &= 0,25 \times 100 \\ &= 25,75 (26\%) \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2017 berada pada angka 20%. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kurang mandiri dalam mengelolah keuangan daerahnya. Sedangkan pada tahun 2018, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja berada pada angka 26% dan pada

tahun 2019 tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja masih bergerak ditempat pada angka 26%.

PEMBAHASAN

Didalam penelitian ini menggunakan 3 rasio keuangan untuk melihat kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten tana toraja. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini ialah rasio efisiensi, efektivitas dan kemandirian.

Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Dengan menggunakan data APBD dan laporan realisasi pemerintah daerah kabupaten tana toraja tahun anggaran 2017-2019, hasil rasio efisiensi yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Periode 2017-2019**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kategori
2017	1.095.027.645.917,93	997.621.856.319,29	91	Tidak Efisien
2018	1.071.079.856.692,94	961.218.936.919,34	90	Tidak Efisien
2019	1.190.812.429.313,08	979.3721.368.464,91	82	Tidak Efisien

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Toraja (Data diolah 2021)

Dengan melihat data pada tabel di atas, masing-masing tahun anggaran dari 2017-2019 masuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami fluktuatif dan begitupun dengan realisasi belanja daerah. Total realisasi pendapatan daerah hampir sama dengan total realisasi belanja daerah, hal ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak efisien dalam mengelola keuangannya.

Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tana Toraja.

Dengan menggunakan data APBD dan laporan realisasi pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2017-2019, hasil rasio efektivitas yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tana Toraja
Periode 2017-2019**

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
2017	150.563.647.813,00	140.418.241.234,93	93	Cukup efektif
2018	184.700.000.000,00	106.108.442.618,94	57	Tidak efektif
2019	187.752.107.000,00	119.464.168.341,55	64	Tidak efektif

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Toraja (Data diolah 2021)

Dengan melihat data pada tabel di atas, dimana tahun 2017 tingkat efektivitas mencapai 93% dengan kategori cukup efektif karena anggaran PAD hampir sama dengan realisasi penerimaan PAD, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 masuk dalam kategori tidak efektif dengan tingkat efektivitas pada angka 56% dan 64% karena anggaran PAD lebih besar dari pada realisasi penerimaan PAD.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Dengan menggunakan data APBD dan laporan realisasi pemerintah daerah kabupaten tana toraja tahun anggaran 2017-2019, hasil rasio kemandirian yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
Periode 2017-2019**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kemandirian (%)	Kategori
2017	753.651.126.889,00	150.563.647.813,00	20	Kurang mandiri
2018	705.129.367.000,00	184.700.000.000,00	26	Sedang
2019	729.080.822.000,00	187.752.107.000,00	26	Sedang

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Toraja (Data diolah 2021)

Dengan melihat data pada tabel di atas, tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Tana Toraja tahun 2017 mencapai tingkat kemandirian 20% dengan kategori kurang mandiri karena PAD lebih rendah dari pada pendapatan transfer, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing mencapai tingkat kemandirian 26% dengan kategori sedang karena PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan.

SIMPULAN

Tingkat efisiensi pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja tidak efisien dalam mengelolah keuangan daerahnya. Dimana, pada tahun 2017-2019 kriteria efisiensinya berada pada angka >40% dan pada tahun 2017 tingkatan efisiensinya berada pada angka 91%. Rasio tersebut terus menurun sampai tahun 2018 dengan angka 90% bahkan merembet sampai ke tahun berikutnya yaitu tahun 2019 dengan ratio sebesar 82%. Hal ini mengindikasikan bahwa system pengelolaan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak pernah mencapai tingkat efisien dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Dengan melihat hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2017-2019 nampak bahwa tingkat efektivitas PAD Kabupaten Tana Toraja berkisar antara 57% sampai 93%. Dimana pada tahun 2017 tingkat efektivitas PAD berada pada angka 93%, sedangkan pada tahun 2018 berada pada angka 57% dan tahun 2019 64%. Angka capaian tersebut mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas PAD Kabupaten Tana Toraja tidak mencapai kriteria efektivitas dan hanya berputar pada kriteria cukup efektif bahkan tidak efektif.

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2017-2019 berada pada kategori kemandirian kurang dan sedang. Dimana rasio kemandirian Keuangan pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja pada tahun 2017 berada pada angka kemandirian 20% dan dua tahun berikutnya yakni tahun 2018 dan 2019 berada pada angka rasio kemandirian 26%. Hal ini mengindikasikan kemandirian keuangan kabupaten Tana Toraja tidak pernah mencapai tingkat kemandirian dalam tiga tahun sesuai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Agustina, Oesi. (2013). Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Universitas Brawijaya. Malang.
- Dwiranda, Aan. (2007). Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. Universitas Udayana, Bali
- Faahakhododo Waruwu, (2009). Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonom Daerah Di Kabupaten Nias Tahun 2001-2007. Tesis S-2, PPS UGM (tidak dipublikasikan)
- Hemi Oppier. (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupten Maluku Tenggara. Jurnal Benchmark Volume 2 November 2013

Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi

Vol.1, No.2 Desember 2022

e-ISSN: 2964-2027; p-ISSN: 2964-5700, Hal 181-189

Hony Adhiantoko (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 20017-2011)

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Marizka, Addina. 2009. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan: Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Mohammad Mahsun (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPF

Nahmiati, Erny. (2008). Analisis Kebijakan PeningkatanKemampuan Keuangan Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Bima), Tesis S-2, PPS UGM (tidak dipublikasikan)

Puput Risky Pramita (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013

Rahayu, Sri at. Al. (2007). Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi. SNA X Unhas Makasar